COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR

Fahmi Ahmad Naufal Faizin
NPP. 33.0538
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: fahmifaizin1501@gmail.com

Pembimbing Skripsi: D. Adam Ismail, S.IP, M.Si
Email: Adam.jagau@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): Flood disasters in Jember Regency represent a recurring problem with complex multi-dimensional impacts, requiring coordinated management involving multiple stakeholders. Despite existing collaborative efforts among BPBD, UPT Damkar, MDMC, and the community, there is a significant research gap: no formal cooperation agreements (MoU) exist among these institutions, coordination remains situational and individual-dependent, and community disaster preparedness is uneven, particularly in remote areas. **Purpose:** This study aims to analyze the application of collaborative governance in flood disaster management in Jember Regency, East Java Province. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observation, and documentation. The analysis applies the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash (2008) covering five dimensions: face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. Data were collected from five purposively selected informants comprising the Head of BPBD, the Head of UPT Damkar, BPBD field staff, MDMC officer, and community members. The research was conducted in Jember Regency from January to March 2026. **Result:** The study found that collaborative governance in flood management has been running reasonably well across all five dimensions. Face-to-face dialogue is realized through regular cross-sectoral coordination meetings, situational readiness musters, and digital communication via WhatsApp groups. Trust is built through transparent information sharing in coordination forums and BPBD's official social media. Commitment to process is demonstrated by the collective awareness that flood complexity requires multi-actor collaboration. Shared understanding is reflected in the clear, though informal, division of roles: BPBD as coordinator, UPT Damkar for evacuation, MDMC for humanitarian services, and community members as frontline responders. Intermediate outcomes are evidenced by successful evacuations, targeted logistics distribution, and post-disaster evaluations used to improve future strategies although significant obstacles remain. **Conclusion:** The implementation of collaborative governance in Jember Regency shows a positive direction but requires strengthening through formal MoU development, structured coordination forums, expanded Disaster-Resilient Village programs, modernized disaster information systems, and stronger local regulations governing multi-sector collaboration.

Keywords: *Collaborative Governance; Coordination; Flood Disaster; Jember Regency.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Bencana banjir di Kabupaten Jember merupakan permasalahan yang terjadi secara berulang dengan dampak yang kompleks. Meskipun telah terdapat upaya kolaborasi antara BPBD, UPT Damkar, MDMC, dan masyarakat, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan: belum adanya dokumen kerja sama formal (MoU) antar lembaga, koordinasi yang masih bersifat situasional dan bergantung pada inisiatif individu, serta kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata, khususnya di wilayah terpencil. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menerapkan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008) yang mencakup lima dimensi: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Data dikumpulkan dari lima informan yang dipilih secara *purposive* terdiri atas Kepala BPBD, Kepala UPT Damkar, staf lapangan BPBD, petugas MDMC, dan masyarakat terdampak. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jember pada bulan Januari hingga Maret 2026. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir telah berjalan cukup baik pada kelima dimensi teori Ansell dan Gash. Dialog tatap muka diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas sektor, apel siaga situasional, dan komunikasi digital via grup WhatsApp. Kepercayaan dibangun melalui keterbukaan informasi di forum koordinasi dan media sosial resmi BPBD. Komitmen terhadap proses tercermin dari kesadaran kolektif seluruh aktor bahwa kompleksitas banjir tidak dapat ditangani satu instansi saja. Pemahaman bersama terlihat dari pembagian peran yang relatif jelas: BPBD sebagai koordinator, UPT Damkar untuk evakuasi, MDMC untuk layanan kemanusiaan, dan masyarakat sebagai garda terdepan. Hasil sementara ditunjukkan oleh keberhasilan evakuasi, distribusi logistik tepat sasaran, dan evaluasi pascabencana yang dijadikan dasar perbaikan strategi meskipun terdapat hambatan signifikan. **Kesimpulan:** Penerapan *collaborative governance* di Kabupaten Jember menunjukkan arah positif namun memerlukan penguatan melalui penyusunan MoU formal, forum koordinasi yang terstruktur, perluasan program Desa Tangguh Bencana, modernisasi sistem informasi kebencanaan, dan regulasi daerah yang mengatur kolaborasi lintas sektor.

Kata kunci: Bencana Banjir; *Collaborative Governance*; Kabupaten Jember; Koordinasi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Posisi Indonesia di persimpangan tiga lempeng tektonik utama (Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia) menjadikannya inheren rawan terhadap berbagai bencana alam (Clegg et al., 2023). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2024), banjir mendominasi kejadian bencana di Indonesia dengan 453 kejadian dalam periode pengamatan terakhir, jauh melampaui jenis bencana lainnya. Pada tahun 2025, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kejadian banjir tertinggi ketiga secara nasional dengan sekitar 70 kejadian, setelah Jawa Tengah (80 kejadian) dan Jawa Barat (75 kejadian).

Kabupaten Jember yang dilalui sejumlah sungai besar seperti sungai bondoyudo, mengalami banjir secara berulang setiap tahun. Data menunjukkan fluktuasi kejadian penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 11 kasus, namun kembali meningkat menjadi 16 kasus pada tahun 2024. Dalam menghadapi perubahan iklim, yang diperparah dengan pertumbuhan populasi, bahaya hidroklimat terus berdampak sangat besar bagi masyarakat di seluruh dunia, dengan ribuan nyawa hilang setiap tahun, jutaan orang mengungsi, dan kerugian ekonomi (Majszak & Wani, 2026). Kolaborasi telah muncul sebagai mekanisme untuk memobilisasi pengetahuan, mendorong kolaborasi interdisipliner, dan mendukung pengambilan keputusan di berbagai konteks untuk mengatasi berbagai masalah termasuk kebencanaan (Pilla et al., 2026). Dalam hal ini pemerintah sebagai pusat koordinasi harus memiliki kemampuan yang kompeten karena memiliki poros tanggung jawab dalam keberlangsungan pemerintahan termasuk kejadian bencana. Perlu adanya pengelalolaan yang baik dalam menjalankan tanggungjawab tersebut. Studi tata kelola adalah bidang studi yang mempelajari manifestasi pemerintahan melalui perilaku pejabat pemerintah, proses aktivitas pemerintah, dan konsekuensi sosial dari tindakan pemerintah (Pitono et al., 2023). Dalam pelaksanaan kolaborasi juga harus didukung oleh publik karena penguatan partisipasi publik dalam pemerintahan sejalan dengan perkembangan nilai-nilai demokrasi yang melahirkan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang dinamis, dan tata kelola pemerintahan kolaboratif (Tarigan et al., 2023). Dampak banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian materil, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat (Taryana dkk., 2022).

Kompleksitas penanggulangan bencana banjir menjadikan pendekatan *collaborative governance* sangat relevan. *Collaborative governance* menekankan keterlibatan berbagai aktor dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik secara bersama-sama (Ansell & Gash, 2008). Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong peningkatan pemanfaatan layanan teknologi oleh masyarakat (Wiramadana et al., 2025). Dalam konteks penanggulangan banjir di Kabupaten Jember, kolaborasi antara BPBD, UPT Damkar, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan masyarakat telah terbentuk namun belum berjalan secara optimal. Penelitian ini hadir untuk memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai penerapan, hambatan, dan upaya penguatan *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Jember.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Jember, sementara banjir merupakan ancaman yang terus berulang dengan dampak yang semakin kompleks. Terdapat beberapa kesenjangan utama: Pertama, belum adanya dokumen kerja sama formal seperti Memorandum of Understanding (MoU) yang mengikat BPBD, UPT Damkar, dan MDMC, sehingga kolaborasi masih bersifat situasional. Kedua, keterbatasan sumber daya (SDM dan anggaran) BPBD dan UPT Damkar yang tidak proporsional dengan frekuensi dan skala banjir. Ketiga, ego sektoral yang pernah menimbulkan selisih paham antar lembaga terkait pengelolaan sarana. Keempat, kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata, dengan sebagian warga menolak dievakuasi sehingga memperlambat proses penanganan. Kelima, sistem informasi kebencanaan yang belum terintegrasi, menyebabkan keterlambatan penyebaran informasi peringatan dini di wilayah

terpencil. Meskipun berbagai studi telah mengkaji *collaborative governance* dalam kebencanaan, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji aspek kelembagaan dan hambatan struktural *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Jember secara komprehensif mencakup seluruh siklus bencana.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Jember sebagai dasar perumusan strategi penguatan kolaborasi oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Mengingat Kabupaten Jember terus mengalami banjir berulang dengan tren peningkatan pada 2024, penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan yang mendesak. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola kolaborasi yang ada, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan efektivitas respons bencana. Akibatnya, kebijakan penanggulangan banjir berisiko tidak tepat sasaran dan upaya kolaborasi berpotensi stagnan karena tidak didukung oleh data yang memadai.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks *collaborative governance* dan penanggulangan bencana. Alimin dkk. (2022) mengkaji proses *collaborative governance* dalam mencegah abrasi pantai di Desa Numana Kabupaten Wakatobi menggunakan teori Ansell dan Gash, menemukan bahwa kolaborasi multi-pihak yang menerapkan lima tahap proses kolaboratif mampu mencegah abrasi secara efektif. Yulianto & Mutiarin (2018) meneliti *collaborative governance* dalam Desa Tangguh Bencana di Desa Poncosari Kabupaten Bantul, menemukan bahwa pengalaman bencana masa lalu, dukungan BPBD, dan forum masyarakat menjadi faktor penentu kolaborasi. Risyadi (2023) mengkaji kolaborasi perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran di Kutai Kartanegara, menemukan kolaborasi berjalan baik namun perlu diperkuat melalui sosialisasi lintas pihak. Hasna & Darumurti (2023) menganalisis *collaborative governance* dalam mitigasi banjir rob di Pekalongan menggunakan teori Edward Deseve, menemukan program kolaboratif antara pemerintah dan LSM berhasil mengurangi risiko banjir meski keterbatasan sumber daya menyebabkan program belum merata. Aulia (2019) meneliti strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir di Tompobulu Kabupaten Maros menggunakan teori David, menemukan bahwa Musrenbang dan program Kampung Iklim menjadi strategi adaptif yang efektif. Isbandono & Prastyawan (2019) mengkaji regulasi penanggulangan bencana di Kabupaten Kediri, memberikan perspektif normatif yang relevan terhadap kerangka hukum penanggulangan bencana di tingkat daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dari beberapa aspek. Dari segi fokus, penelitian ini mengkaji *collaborative governance* secara komprehensif mencakup seluruh siklus penanggulangan banjir (prabencana, saat bencana, dan pascabencana), berbeda dari Hasna & Darumurti (2023) yang hanya berfokus pada tahap mitigasi. Dari segi karakteristik objek penelitian, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember yang memiliki karakteristik kebencanaan unik dengan jaringan sungai yang kompleks dan kerentanan wilayah yang tinggi, berbeda dari

lokus penelitian terdahulu. Dari segi temuan, penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi absennya MoU formal sebagai hambatan struktural yang belum banyak dikaji dalam literatur *collaborative governance* kebencanaan di Jawa Timur. Dari segi teori, penelitian ini mengaplikasikan seluruh lima dimensi teori Ansell & Gash (2008) secara utuh dalam konteks penanggulangan banjir di Kabupaten Jember, sementara sebagian penelitian terdahulu hanya berfokus pada dimensi proses kolaboratif saja.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk memahami secara mendalam dinamika, proses, dan kompleksitas *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data numerik semata (Creswell, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Observasi adalah kegiatan dengan menggunakan pancaindera untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian (Simangunsong, 2017).

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan peran dan keterlibatan langsung dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Jember. Terdapat 5 (lima) informan yang terdiri atas: (1) Kepala BPBD Kabupaten Jember (I1) sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan koordinasi dan kebijakan utama; (2) Kepala UPT Damkar Kabupaten Jember (I2) sebagai pelaksana teknis evakuasi; (3) Staf Lapangan BPBD Kabupaten Jember (I3) yang memiliki pengalaman langsung di lapangan; (4) Petugas Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kabupaten Jember (I4) sebagai representasi organisasi masyarakat sipil; dan (5) Masyarakat terdampak banjir (I5) sebagai penerima manfaat langsung. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi koordinator, pelaksana teknis, pendukung kemanusiaan, dan penerima manfaat.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pemerintah, lembaga mitra, dan masyarakat) serta triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008) dengan lima dimensi: dialog tatap muka *(face to face dialogue)*, membangun kepercayaan *(trust building)*, komitmen terhadap proses *(commitment to process)*, pemahaman bersama *(shared understanding)*, dan hasil sementara *(intermediate outcomes)*. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan instansi utama BPBD dan UPT Damkar Kabupaten Jember, selama bulan Januari hingga Maret 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Jember menggunakan teori Ansell dan Gash (2008). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Dialog Tatap Muka *(Face to Face Dialogue)*

Dialog tatap muka merupakan dimensi pertama dalam kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) yang menekankan pentingnya komunikasi langsung antara para aktor untuk membangun kesepahaman dan mengurangi stereotip. Dalam konteks penanggulangan banjir di Kabupaten Jember, dialog tatap muka diwujudkan melalui tiga mekanisme utama.

Pertama, rapat koordinasi lintas sektor yang diselenggarakan secara rutin minimal satu hingga dua kali dalam setahun, melibatkan BPBD, UPT Damkar, MDMC, TNI, Polri, dan perwakilan kecamatan rawan banjir. Kedua, apel siaga situasional yang digelar setiap kali ada informasi dari BMKG terkait potensi curah hujan tinggi. Ketiga, komunikasi digital via grup WhatsApp koordinasi yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan real-time. Kepala BPBD Kabupaten Jember (I1) menegaskan:

"Kami tidak menunggu bencana dulu baru berkoordinasi, tapi kami terus membangun komunikasi sejak jauh-jauh hari sebelum bencana terjadi."

Berdasarkan observasi lapangan, forum koordinasi yang berjalan secara berkala ini telah menjadi mekanisme utama yang mempererat sinergi antar aktor. Namun, efektivitas dialog masih bergantung pada situasi darurat, sehingga perlu adanya forum koordinasi yang lebih terjadwal dan bersifat mengikat pada kondisi normal.

3.2. Membangun Kepercayaan *(Trust Building)*

Kepercayaan antar aktor dalam kolaborasi dibangun melalui keterbukaan informasi terkait kondisi bencana, distribusi bantuan, dan langkah penanganan yang disampaikan secara terbuka melalui rapat koordinasi maupun media sosial resmi BPBD. Kepala BPBD (I1) menyatakan bahwa seluruh pihak selalu dilibatkan dalam forum koordinasi agar tidak ada yang merasa tertinggal informasi. Pengakuan timbal balik atas peran masing-masing aktor termasuk relawan MDMC dan masyarakat yang menjadi kunci dalam menjaga semangat dan komitmen bersama.

Petugas MDMC (I4) mengonfirmasi bahwa kepercayaan dibangun melalui konsistensi BPBD dalam melibatkan seluruh pihak sejak tahap perencanaan:

"Dari sisi MDMC, kesepakatan yang paling konkret itu menyangkut pembagian peran dalam situasi tanggap darurat. BPBD sebagai koordinatornya, Damkar yang menangani evakuasi fisik, dan MDMC di sisi kemanusiaan."

Kepercayaan yang telah terbangun ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kolaborasi, meskipun masih perlu diperkuat melalui mekanisme evaluasi bersama yang lebih terstruktur.

3.3. Komitmen Terhadap Proses *(Commitment to Process)*

Komitmen terhadap proses dalam kerangka Ansell & Gash (2008) merujuk pada kesediaan dan konsistensi para aktor untuk terlibat aktif dalam seluruh tahapan kolaborasi. Di Kabupaten Jember, komitmen ini tercermin dari kesadaran kolektif seluruh aktor bahwa kompleksitas banjir tidak dapat ditangani secara mandiri oleh satu instansi. BPBD konsisten menjalankan fungsi

koordinasi, UPT Damkar selalu siaga dalam setiap panggilan darurat, dan MDMC tidak pernah absen memberikan dukungan kemanusiaan.

Komitmen ini juga tercermin dari saling ketergantungan *(interdependence)* yang disadari penuh oleh semua pihak. Kepala UPT Damkar (I2) menyampaikan:

"Ketika banjir terjadi di beberapa titik secara bersamaan, kami jelas tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh informasi dari BPBD soal prioritas lokasi mana yang paling mendesak."

Komitmen yang ada masih bersifat informal karena tidak didukung dokumen kerja sama tertulis. Masyarakat terdampak (I5) pun mengonfirmasi adanya kesepakatan tidak tertulis di tingkat komunitas, seperti mekanisme pemantauan ketinggian air sungai dan sistem tanda peringatan lokal, yang telah berjalan secara turun-temurun.

3.4. Pemahaman Bersama *(Shared Understanding)*

Pemahaman bersama dalam kolaborasi penanggulangan banjir di Kabupaten Jember tercermin dari kejelasan pembagian peran antar aktor. BPBD berperan sebagai koordinator utama dan pusat komando; UPT Damkar menangani evakuasi dan penyelamatan fisik di lapangan; MDMC bertanggung jawab pada aspek kemanusiaan seperti dapur umum, distribusi logistik, dan *trauma healing*; sementara masyarakat dan relawan berperan sebagai garda terdepan dalam pemantauan dan kesiapsiagaan lokal. Kepala BPBD (I1) menjelaskan:

"BPBD berperan sebagai koordinator dan pengendali situasi dari pusat komando. UPT Damkar kami libatkan untuk evakuasi dan penyelamatan di lapangan. MDMC dari Muhammadiyah sangat membantu dalam penyediaan dapur umum, distribusi logistik, dan layanan kesehatan bagi pengungsi."

Pemahaman bersama telah terinternalisasi hingga tingkat masyarakat. Namun, pembagian peran ini masih bersifat informal tanpa landasan dokumen formal yang mengikat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam situasi bencana berskala besar.

3.5. Hasil Sementara *(Intermediate Outcomes)*

Dimensi hasil sementara atau *small wins* dalam kerangka Ansell & Gash (2008) merujuk pada capaian-capaian awal dari proses kolaborasi yang menjadi indikator bahwa proses berjalan ke arah positif. Di Kabupaten Jember, hasil sementara terlihat dari keberhasilan tanggap darurat: evakuasi korban yang berjalan cepat dan aman, distribusi bantuan logistik yang tepat sasaran, serta penanganan pengungsian yang terkoordinasi.

Kepala BPBD (I1) menyampaikan bahwa mekanisme evaluasi pascabencana telah dijalankan secara konsisten, dengan contoh konkret perbaikan distribusi logistik pascabanjir yang aktif dijadikan dasar penyempurnaan strategi. Staf lapangan BPBD (I3) menambahkan bahwa program normalisasi sungai dan pembersihan saluran drainase yang didukung bersama dinas terkait merupakan wujud nyata dari pemanfaatan hasil sementara untuk perbaikan ke depan. Pendekatan berbasis pembelajaran empiris ini mencerminkan komitmen kolektif terhadap peningkatan kualitas kolaborasi yang berkelanjutan.

Jaringan kolaboratif bukti global telah muncul sebagai mekanisme untuk memobilisasi pengetahuan, mendorong kolaborasi interdisipliner, dan mendukung pengambilan keputusan di berbagai konteks (Jordan & Pilla, 2026). Aliansi kolaboratif jarang setara dan sering dibentuk oleh asimetri kekuasaan, yang menyebabkan distribusi nilai yang tidak merata dan diperebutkan. Untuk

mendorong kolaborasi, pihak berwenang dapat memperkenalkan penghargaan atau sanksi melalui legislasi, yang menggambarkan bagaimana kolaborasi beroperasi di bawah bayang-bayang hierarki (Waage & Amdam, 2026). Perlu mengintegrasikan teori tata kelola dan pemangku kepentingan untuk memeriksa bagaimana struktur kelembagaan, kepemimpinan politik, dan mekanisme partisipatif membentuk kesuksesan suatu perencanaan, khususnya dalam kolaborasi untuk menangani suatu banjir di Kabupaten Jember tersebut (Kim Hoang, 2026).

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Jember telah berjalan cukup baik pada seluruh dimensi teori Ansell & Gash (2008). Sama halnya dengan temuan Alimin dkk. (2022) bahwa kolaborasi multi-pihak yang menerapkan model Ansell dan Gash menghasilkan respons yang efektif terhadap ancaman lingkungan, kolaborasi di Kabupaten Jember juga menunjukkan efektivitas yang relatif baik dalam penanganan banjir. Temuan ini juga memperkuat penelitian Yulianto & Mutiarin (2018) yang menemukan bahwa kepemimpinan fasilitatif dari BPBD dan partisipasi aktif komunitas menjadi prasyarat keberhasilan kolaborasi.

Berbeda dengan temuan Hasna & Darumurti (2023) yang berfokus pada keterbatasan sumber daya sebagai hambatan utama, penelitian ini menemukan bahwa absennya MoU formal merupakan hambatan struktural yang lebih mendasar karena menyebabkan seluruh kolaborasi bergantung pada inisiatif personal dan situasi darurat. Temuan ini merupakan kontribusi baru yang memperluas penelitian sebelumnya. Sama halnya dengan temuan Risyadi (2023) bahwa kolaborasi masih perlu diperkuat melalui formalisasi mekanisme kerja sama, penelitian ini merekomendasikan hal yang sama dalam konteks penanggulangan banjir di Kabupaten Jember.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan sejumlah faktor penghambat *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Jember: Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang menyebabkan jumlah armada UPT Damkar tidak sebanding dengan luas wilayah, sehingga saat banjir terjadi di beberapa kecamatan secara bersamaan harus dilakukan skala prioritas. Kedua, ego sektoral yang pernah menimbulkan selisih paham antara BPBD dan UPT Damkar terkait pengelolaan sarana, menunjukkan batas-batas kewenangan kelembagaan belum sepenuhnya dipahami. Ketiga, kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata, dengan sebagian warga menolak dievakuasi karena khawatir meninggalkan harta benda, memperlambat proses penanganan dan meningkatkan risiko bagi petugas lapangan. Keempat, sistem informasi kebencanaan yang belum terintegrasi menyebabkan keterlambatan penyebaran peringatan dini di wilayah terpencil. Kelima, belum kuatnya landasan hukum berupa MoU formal antar lembaga menjadikan komitmen kolaborasi bersifat sukarela dan rentan terhadap perubahan kondisi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Jember yang melibatkan BPBD, UPT Damkar, MDMC, dan masyarakat secara umum telah berjalan cukup baik, tercermin dari terlaksananya

kelima dimensi teori Ansell dan Gash (2008). Guna meningkatkan efektivitas *collaborative governance*, disarankan: (1) segera menyusun MoU/PKS formal antar lembaga yang mengatur pembagian peran dan mekanisme koordinasi; (2) membangun forum koordinasi lintas sektor yang terjadwal, terstruktur, dan bersifat mengikat; (3) memperluas program Desa Tangguh Bencana ke seluruh wilayah rawan banjir; (4) memodernisasi sistem informasi kebencanaan berbasis teknologi termasuk pengembangan aplikasi pelaporan masyarakat; dan (5) menyusun regulasi daerah yang mengatur mekanisme kolaborasi lintas sektor secara komprehensif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa cakupan lokasi yang hanya berfokus pada Kabupaten Jember dengan 5 informan, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke daerah lain yang memiliki karakteristik kebencanaan berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work)*. Penulis menyarankan penelitian lanjutan yang membandingkan praktik *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur secara kuantitatif untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat secara ilmiah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Jember, Kepala UPT Damkar Kabupaten Jember, petugas MDMC Kabupaten Jember, dan seluruh masyarakat terdampak banjir yang bersedia menjadi informan. Penghargaan juga disampaikan kepada Bapak D. Adam Ismail, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga, serta kepada seluruh sivitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang mendukung terlaksananya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alimin, H. J., Muhiddin, A., & Hardi, R. (2022). Collaborative Governance Process in Preventing Beach Abrasion In Numana Village Wakatobi District. *Sukrasana: Journal Social and Political Review, 1*(1), 1–12. https://doi.org/10.56680/sukrasana.v1i1.15

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Aulia, D. N. I. (2019). Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5*(2), 157–176. https://doi.org/10.26618/kjap.v5i2.2297

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Data Informasi Bencana Indonesia*. BNPB. https://dibi.bnpb.go.id/

Clegg, S., Cunha, M. P., & Berti, M. (2023). Governing through disasters: Power, resilience, and institutional innovation. *Organization Studies, 44*(7), 1043–1063. https://doi.org/10.1177/01708406221113

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Eva Eviany, & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat dalam Perspektif Fungsi Pemerintah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik, 8*(1), 23–34.

Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 7*(1), 25–37. https://doi.org/10.22437/jisip.v7i1.22450

Isbandono, P., & Prastyawan, A. (2019). Regulasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kediri. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 3*(1), 35–43. https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n1.p35-43

Islamy, M. I. (2018). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (9th ed.). Bumi Aksara.

Lusmianingtyas, I., & Suwarno, S. (2022). Peran Sekolah dalam Pendidikan Mitigasi Bencana. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 6*, 81–84. https://doi.org/10.30595/pssh.v6i.537

Ma'ruf, M. F., & Isbandono, P. (2017). Urgensi Kerjasama Antar Daerah dalam Penanganan Bencana Alam. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1*(1), 47–54. https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p47-54

Masjszak, M., & Wani, O. (2026). *What defines a flood. Journal of Health Organization and Management, 40*(9), 17-38. https://doi.org/10.1038/s43247-026-03491-2

Pilla, B., & Jordan, Z,. (2026) Addressing global health equity through Global Collaborative Evidence Networks: a narrative literature review of governance models, power and participation. *Journal Globalization and Health, 1*(22), 28. https://doi.org/10.1186/s12992-026-01192-1

Pitono, A., Harahap, A.S., Kartiwi,K., & Baidhowah,A. R. (2023). Informal Institutions, Government Regulatory Functions, and Development of Governance Studies. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 16*(2), 107-123. https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3746

Risyadi, F. (2023). Kolaborasi Perangkat Daerah, Dunia Usaha, dan Kelompok Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform, 11*(1), 45–58.

Simangunsong, Fernandes. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. https://www.researchgate.net/publication/325120254_Metodologi_Penelitian_Pemerintahan

Tarigan, M.H., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2023) *COLLABORATIVE GOVENANCE IN MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN KARO REGENCY 2015-2019. XI*(5), 1257-1268. https://russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/2809

Taryana, D., Kusdiana, D., & Harto, B. (2022). Analisis Risiko dan Kerentanan Banjir di Wilayah Perkotaan Indonesia. *Jurnal Kebencanaan Indonesia, 5*(1), 12–26.

Taufan Maulana, R., & Andriansyah, M. (2024). Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim di Indonesia: Tren dan Proyeksi. *Jurnal Mitigasi Bencana Nasional, 3*(1), 1–15.

Yulianto, A., & Mutiarin, D. (2018). Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Desa Tangguh Bencana (Destana) Studi Kasus Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. *APPPTMA Seminar Paper*, 8. https://doi.org/10.31219/osf.io/n2hjg

Kim Hoang, N. (2026). The role of urban governance in smart cities development in Vietnam. *Discover Sustainability, 7*(1). https://doi.org/10.1007/s43621-026-02789-7

Wiramadana, Halilul Khairi, Pambayun, K,. G,. (2025). Evaluation of the Quality of Use oh the Makaverse News Application Regarding the Digital Divide in Makassar City, Indonesia. *International Journal of Kybernology, 6*(2). https://doi.org/10.33701/ijok.v6i2.5843